

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia dibentuk atas dasar pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.(Nasional, 2014)

Pentingnya upaya pembangunan ekonomi di berbagai negara tercermin pada penerimaan luas yang nyaris bersifat universal atas peranan dan fungsi perencanaan pembangunan sebagai jalur yang paling langsung dan paling meyakinkan untuk mencapai kemajuan ekonomi. Perencanaan pembangunan merupakan salah satu program utama dalam pemerintahan. Tetapi tidak dapat ditapik bahwa dalam proses pembangunan selalu ditemukan berbagai rintangan demi mencapai tingkat perekonomian yang tinggi, dan setiap negara mengalami problemnya sendiri, tidak terkecuali Indonesia.

Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Baik dalam dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan. Dengan infrastruktur yang memadai, biaya produksi, transportasi, komunikasi dan logistik semakin murah, jumlah produksi meningkat, laba usaha meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketersediaan infrastuktur juga mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antar wilayah sehingga mendorong investasi yang baru, lapangan kerja baru dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Konektivitas antar penduduk suatu negara juga semakin dekat dan membuka isolasi bagi masyarakat yang terbelakang.

Berdasarkan *The Global Competitiveness Report 2013/2014* yang dibuat oleh *World Economic Forum* (WEF), daya saing Indonesia (*Global Competitiveness Index-GCI*) berada pada peringkat ke-38 dunia. Sementara itu kualitas infrastruktur Indonesia menempati peringkat ke-61 dari 148 negara dunia yang disurvei atau berada pada peringkat ke-5 di antara negara-negara inti ASEAN. Di antara negara-negara ASEAN tersebut Singapura mendapat peringkat GCI tertinggi ke-2 dunia, Malaysia peringkat ke-24, Brunei Darussalam peringkat ke-26, Thailand satu peringkat di atas Indonesia yaitu ke-37, Filipina ke-59, dan Vietnam ke-70. Sedangkan dari segi penilaian infrastruktur, Singapura mendapat ranking ke-2 dunia, Malaysia ke-29, Thailand

ke-47, Brunai Darussalam ke-58, Indonesia ke-61, Vietnam dan Laos masing-masing ke-82 dan 84, sedangkan Filipina peringkat ke-96 dunia. (Suroso, 2015)

Data di atas kemudian mengalami perubahan yaitu peningkatan empat angka dengan dilangsirnya data WEF 2014/2015. Daya saing global Indonesia periode 2014-2015 meningkat empat peringkat dari sebelumnya 38 menjadi 34. Sedangkan dari segi infrastruktur dan konektivitas, ranking Indonesia meningkat dari ranking ke-61 menjadi ranking ke-56. Hal ini berarti menunjukkan peningkatan lima angka dari tahun kemarin atau dua puluh angka sejak 2011. (Suroso, 2015)

Selain Indonesia yang terus melakukan upaya dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai kesejahteraan masyarakat, beberapa tahun belakangan ini kawasan Asia pada umumnya telah memperlihatkan perkembangan yang sangat signifikan dari segi ekonomi dan pembangunan yang dipromotori oleh Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok/ RRT) dan India, hal ini tentu menjadi pendorong tersendiri untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa negara-negara Asia sedang memacu diri untuk menjadi kekuatan baru yang sedari dulu berada di bawah kekuasaan Amerika dan Eropa.

Tiongkok terus memperkuat pengaruhnya tidak hanya dengan menonjolkan kekuatan militer tetapi juga kekuatan ekonomi melalui kegiatan perdagangan dengan membentuk bank baru yang diberi nama *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yang merupakan inisiasi dari Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang ketika melakukan kunjungan ke negara-negara Asia Tenggara pada Oktober 2013. (Hanafi, 2015)

Indonesia dan Tiongkok mulai menjalin hubungan diplomatik pada tanggal 13 April 1950, yang kemudian dibekukan pada 30 Oktober 1967 akibat tragedi 30 September di tahun 1965. Hubungan bilateral mulai kembali membaik sejak tahun 1980-an, ketika Menteri Luar Negeri Tiongkok Qian Qichen bertemu dengan Presiden Soeharto dan Menteri Negara Moediarso dari Indonesia pada tahun 1989 untuk membahas dimulainya kembali hubungan diplomatik kedua negara. (Sekilas Hubungan Bilateral Tiongkok dan Indonesia)

Oktober 2013 lalu, untuk pertama kalinya presiden Xi Jinping mengumumkan gagasan *Maritime Silk Road of the 21th* (MSR). Demi merealisasikan mega proyek MSR, Tiongkok mendirikan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur transportasi negara-negara Asia. (Rahmawaty, 2015)

Indonesia yang telah bergabung dengan AIIB semenjak penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) AIIB yang dilakukan pada tanggal 25 November 2014, bertempat di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Pramadi, 2014) juga memutuskan ikut serta dalam inisiatif strategis MSR yang bersinergi dengan cita-cita Indonesia yang ingin kembali menjadi poros maritim dunia melihat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

Bergabungnya Indonesia sebagai anggota AIIB menjadi hal yang menarik untuk di kaji melihat bahwa Indonesia sebelumnya telah bergabung dengan beberapa lembaga keuangan internasional, baik yang berskala regional seperti *ASEAN Infrastructure Fund* (AIF), *Asian Development Bank* (ADB), serta yang

berskala Internasional seperti *World Bank* (WB) yang telah menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam waktu yang cukup lama.

Hal tersebut menjadi alasan yang secara akademik mendorong penulis untuk mengangkat skripsi ini dengan judul **“Kepentingan Indonesia Bergabung dalam *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB)”**.

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi Indonesia bergabung dengan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB).
2. Sebagai bahan referensi dan diskusi para pencinta ilmu dalam membahas Asia sebagai kekuatan baru dunia.

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menetapkan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: **“Mengapa Indonesia bergabung dalam *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB)?”**

D. Kerangka Pemikiran / Teori yang digunakan:

Dalam upaya menjawab rumusan masalah dan menarik hipotesa, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang relevan untuk mendeskripsikan kepentingan Indonesia bergabung dengan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Gambaran tentang pendekatan diuraikan sebagai berikut:

1. Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest Concept*)

Secara fundamental dapat ditelaah bahwasanya setiap tindakan yang dilakukan oleh negara baik dalam skala internal maupun eksternal dilakukan dengan tujuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengejar, memperoleh, dan mempertahankan kepentingan nasional sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara.

Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang populer dalam menganalisa permasalahan yang timbul dalam kajian hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan maupun menganjurkan perilaku para aktor. Kepentingan nasional merupakan alasan utama suatu negara untuk mengambil suatu kebijakan luar negerinya. Morgenthau berpendapat bahwa perilaku negara dalam hubungan internasional dituntut oleh pengejaran kepentingan nasional, kepentingan nasional itu adalah memperoleh, mempertahankan atau memperbesar kekuatan negara. (Mas'ood, 1990)

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. (Plano & Olton, 1999)

Bergabungnya Indonesia sebagai anggota AIIB merupakan perpanjangan tangan dari kebutuhan Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. AIIB yang dibentuk khusus untuk memberikan pinjaman pembangunan infrastruktur di kawasan Asia akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia, sebagai negara maritime terbesar di kawasan Asia Tenggara, akan menjadikan Indonesia sebagai partner yang diperhitungkan oleh AIIB.

Dari kepentingan nasional suatu negara mampu menghasilkan berbagai kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan suatu negara, baik dalam negeri maupun luar negeri, umumnya bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/ideologi yang dipegang dan ingin dicapai oleh suatu negara. Kepentingan nasional menggerakkan aktor untuk melakukan suatu interaksi dengan aktor lainnya. (Saputra, 2013)

Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai sejumlah tujuan suatu negara yang mengerucut untuk kepentingan yang lebih luas dengan cara meningkatkan dan mempertahankan *power* dari suatu negara. Setiap negara memiliki satu kepentingan nasional yang terdiri dari beberapa kepentingan negara. Suatu negara harus menekankan dan memperhatikan satu kepentingan negara dan menunda kepentingan lainnya, dan pilihan tersebut diputuskan berdasarkan petunjuk yang berasal dari kepentingan nasional negara tersebut. (Saputra, 2013)

Indonesia dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengusung Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai jabaran dari visi, misi, dan agenda (*Nawa Cita*) pemerintah dalam mencapai visi pembangunan nasional. Tetapi dalam merealisasikan RPJMN tersebut salah satu masalah dan tantangan pokok yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan nasional adalah ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi sangat terbatas dan harus dapat ditingkatkan. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk memanfaatkan peluang dalam meningkatkan investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik. (Nasional, 2014)

Padahal investasi di bidang infrastruktur memiliki efek *spillover* ekonomi yang kuat. Setiap investasi US\$1 di bidang infrastruktur dapat menghasilkan kebutuhan investasi sebesar US\$3-US\$4 di sektor-sektor ekonomi lainnya. Di Asia, setiap investasi US\$ 1 miliar di sektor infrastruktur dapat menciptakan 18.000 kesempatan kerja. Menurut estimasi ADB, permintaan investasi untuk pembangunan infrastruktur di negara Asia antara tahun 2010 dan 2020 menyentuh US\$8 triliun dengan tambahan US\$290 miliar untuk proyek-proyek regional. (Keuangan, 2014)

Sehingga keikutsertaan Indonesia dalam AIIB yang merupakan bank multilateral baru dengan modal awal sebesar 100 miliar dolar Amerika akan menjadi angin segar dalam membantu Indonesia memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Sebab jika hanya mengandalkan sumber-sumber keuangan tradisional seperti anggaran pemerintah akan semakin sulit karena

tuntutan masyarakat semakin berkembang, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sosial, keamanan dan lain-lain.

2. Politik Luar Negeri (Model Aktor Rasional (*Rational Actor Model*))

Politik luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan (*decision maker*) suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. (Plano & Olton, 1999)

Dalam studi hubungan internasional, kita dapat bahwa kajian kebijakan luar negeri sangat luas dan kompleks. Kebijakan luar negeri dalam pengertian luas terdiri atas pola-pola yang diwujudkan oleh suatu negara dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan nasional, dalam hubungannya dengan negara lain atau dilakukan terhadap lingkungan eksternalnya. Politik luar negeri dapat berarti sebagai tindakan rasional (*rational action*) suatu negara dalam usaha memenuhi kepentingan nasionalnya di lingkungan internasional, dapat juga berarti hanya sebagai pernyataan gramatik yang diucapkan oleh para pemimpin atau penguasa suatu negara terhadap masyarakat internasional, dapat pula sebagai agregasi seluruh kepentingan dalam negeri suatu negara atau bangsa. (Warsito, 1998)

Pada uraian kepentingan Indonesia bergabung dalam AIBB yang menjadi fokus utama penulis adalah proses pembuatan keputusan politik luar

negeri Indonesia dalam mencapai tujuan nasional guna memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur. Dalam menjelaskan hal tersebut penulis menggunakan Model Aktor Rasional dari Graham T. Allison.

Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu *proses intelektual*. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu itu – melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh – berusaha menerapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. (Mas'oeed, 1990) Dengan memperhatikan aspek untung rugi disetiap anternatif-alternatif yang ada.

Tabel 1: Tabel Untung Rugi

Opsi	Keuntungan	Kerugian
Alternatif A	Ada	Ada
Alternatif B	Ada	Ada
Alternatif C	Ada	Ada

Sumber: Graham T. Alison. *The Essence Of Decision*. Dikutip dari diktat perkuliahan Teori Hubungan Internasional, Dr. Nur Azizah. Fisipol-UMY

Sebagai perbandingan, berbagai MDBs (*Multilateral Development Banks*) didirikan dengan latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda. *Asian Development Bank* (ADB) yang merupakan salah satu MDBs terbesar di dunia didirikan pada tahun 1966 sebagai respon banyak penduduk miskin di kawasan Asia sebagai akibat perang. Sekitar 1,7 miliar orang di kawasan

Asia miskin dan tidak mampu mengakses barang, jasa, aset dan kesempatan yang seharusnya diperoleh manusia. Untuk itu, ADB didirikan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan di kawasan Asia Pasifik melalui berbagai kegiatan dan program. Adapun manfaat yang diperoleh negara anggota ADB adalah dapat mengakses pendanaan untuk proyek-proyek yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. (Keuangan, 2014)

ASEAN Infrastructure Fund (AIF) didirikan dengan latar belakang karena adanya kebutuhan dalam penyediaan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan perekonomian di kawasan ASEAN. Keberadaan infrastruktur di kawasan ASEAN juga masih lebih rendah bila dibandingkan dengan beberapa kawasan lain di dunia, antara lain dengan kawasan Asia, Amerika Latin, dan Afrika. AIF bertujuan untuk memfasilitasi sumber dana regional yang tersedia dengan kebutuhan kawasan yang besar akan pendanaan infrastruktur. Manfaat yang diharapkan dari AIF adalah: (i) kerja sama regional yang semakin meningkat, termasuk perdagangan yang lebih besar, (ii) pertumbuhan ekonomi, kawasan yang inklusif dan berkelanjutan, dan (iii) mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pelayanan dan penyediaan infrastruktur dasar. (Keuangan, 2014)

Sementara itu, pendirian AIIB dilatarbelakangi adanya *financing gap* untuk pembiayaan infrastruktur di kawasan Asia, yang mana kebutuhan pembiayaan yang tinggi tidak dapat dipenuhi oleh bank pembangunan multilateral secara baik. Berdasarkan hal tersebut, AIIB didirikan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan integrasi Asia melalui promosi

investasi pada sektor infrastruktur. AIIB bertujuan untuk memberikan dukungan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur kepada negara berkembang di kawasan Asia, termasuk ASEAN. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan akan meningkatkan konektivitas dan integrasi ekonomi di kawasan. Area prioritas AIIB mencakup transportasi, energi, komunikasi, industri, dan pertanian. (Keuangan, 2014)

Ada pun pertimbangan bergabungnya Indonesia dalam AIIB yakni (i) dukungan Indonesia kepada RRT akan memperkuat kerja sama bilateral kedua negara; (ii) bergabungnya Indonesia ke dalam AIIB, akan menambah alternatif sumber pendanaan baru bagi pembangunan infrastruktur Indonesia; dan (iii) bergabungnya Indonesia dalam AIIB akan meningkatkan peran Indonesia dalam memberikan kontribusi pembangunan infrastruktur Asia. (Kemenkeu, 2015)

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa setiap MDBs termasuk di dalamnya AIIB didirikan demi mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang secara rasional mendorong pemerintah Indonesia selaku aktor pengambil keputusan untuk bergabung sebagai salah satu anggota di dalamnya dengan memperhitungkan untung rugi yang akan diperoleh.

Selain itu, Menteri Keuangan Indonesia Bambang PS Brodjonegoro menyatakan bahwa keberadaan AIIB positif bagi Indonesia. Semakin banyak lembaga pembiayaan internasional, semakin baik bagi Indonesia. Selain menghindari ketergantungan pada satu atau dua lembaga pembiayaan global, hal itu akan menciptakan bunga utang yang kompetitif. (Kompas, 2015)

Tabel 2: Tabel Untung Rugi Keikutsertaan Indonesia Bergabung dalam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

Opsi	Keuntungan	Kerugian
Bergabung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kerja sama bilateral Indonesia dan Tiongkok. 2. AIIB menjadi sumber pendanaan alternatif pendanaan infrastruktur Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengaruh Tiongkok sebagai pemilik saham mayoritas dalam AIIB terhadap kepentingannya di Indonesia. 2. Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan kebijakan terkait <i>tax exemption</i> berkaitan keikutsertaan swasta dalam pembangunan infrastruktur.
Tidak Bergabung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan pinjaman luar negeri yang membebani APBN/APBD. 2. Memberikan peluang pendirian bank khusus (bank infrastruktur) yang sedang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpotensi meregangkan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok yang merupakan salah satu mitra utama kerja sama Indonesia. 2. Meningkatkan ketergantungan pinjaman luar negeri dari bank multilateral lain.

Dari tabel di atas terlihat bahwa bergabung atau tidak bergabungnya Indonesia dalam AIIB akan memberikan keuntungan dan kerugian di masing-masing sisi, sehingga dalam hal ini posisi Indonesia memang sangat dilematis, sebab Indonesia membutuhkan pendanaan pembangunan Infrastruktur yang besar sesuai RPJMN tahun 2015-2019, di lain hal Indonesia juga membutuhkan peningkatan pengaruh dalam ranah regional dan global dengan catatan utama guna mencapai kepentingan nasional Indonesia.

E. Hipotesis

Bergabungnya Indonesia dalam *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) dikarenakan untuk mencapai kepentingan nasional dalam merekatkan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok serta memperoleh sumber dana alternatif dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.

F. Jangkauan Penelitian

Pembatasan dalam penelitian dilakukan agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, juga agar permasalahan dan kajian melebur dan wacana yang telah ditetapkan untuk dikaji agar tidak terjadi penyimpangan. Batas-batas dari kajian itu akan mencegah timbulnya kekaburan dan kerancuan wilayah yang dibahas.

Adapun jangkauan penelitian ini dibatasi dari penetapan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 sebagai acuan penyusunan RPJMN 2015-019 yang merupakan rancangan pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi, hingga tahun 2015 sebagai tahun bergabungnya Indonesia dalam AIIB.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis akan menengok peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudah di luar masa tersebut yang dapat mendukung penelitian atas penulisan skripsi ini dikarenakan kajian skripsi ini membahas peristiwa yang baru terjadi dan dalam proses awal pelaksanaan. Walau pun tak seorang pun dapat memprediksi masa depan. Tetapi dalam satu hal kita dapat lebih yakin tentang masa depan dengan membuat ekstrapolasi yang masuk akal dari fakta-fakta yang ada.

G. Metodologi Penelitian

Sebagai sebuah penelitian yang harus dipertanggung jawabkan, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menitik beratkan pada analisa data-data yang sifatnya non angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik, data yang bersifat kuantitatif seperti angka, tabel, grafik yang tersedia diuraikan dan ditafsirkan ke dalam bentuk kalimat atau paragraf.

Sedangkan analisis data, penulis menggunakan deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan situasi yang dipandang relevan secara obyektif dan jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi dan kemudian diambil kesimpulan atas fakta-fakta tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), data diperoleh melalui sumber-sumber yang berasal dari buku, jurnal, diktat, majalah, artikel, surat kabar dan melalui jaringan Internet.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menuangkannya secara sistematis dalam bab ke bab, yakni dari bab I hingga bab V. Berikut ini uraian singkat yang termuat dalam setiap bab.

BAB I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan sekaligus mencakup alasan pemilihan judul, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesis, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas mengenai keanggotaan Indonesia di beberapa *Multilateral Development Bank* (MDB), yaitu *Asian Development Bank* (ADB), *ASEAN Infrastructure Fund* (AIF), dan *World Bank* (WB) sebagai perbandingan yang melatarbelakangi perlunya Indonesia bergabung dalam *Asian Infrastruktur Investment Bank* (AIIB).

BAB III akan membahas mengenai profil *Asian Infrastruktur Investment Bank* (AIIB) sebagai bank multilateral baru dan Posisi keanggotaan Indonesia di dalamnya.

BAB IV akan membahas mengenai kepentingan Indonesia bergabung dalam *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) dan upaya dalam mewujudkan nawa cita Indonesia Poros Maritim Dunia.

BAB V berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan penulis dari bab-bab sebelumnya.